



UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Pengujian Peraturan Perundang-undangan					
Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator PRODI
Program Studi: Hukum Tata Negara		.			Muhammad Idzhar, Lc., M.H.
Capaian	CPL-PRODI				
Pembelajaran (CP)		1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan HukumTata Negara (Siyasah) 2. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upayawirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yangberlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, daninovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkannilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 4. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab(<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan dibidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang HukumTata Negara (Siyasah)secara mandiri; 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dankewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum danbidang HukumTata Negara (Siyasah)			
	CP-MK				
		1. MemahamMampi Konsep Pemerintahan dan Pemerintah Daerah 2. Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia 3. Mampu memahami Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah			
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan keahlian yang ditawarkan kepada mahasiswa HTN (Siyasah) sebagai materi dalam memperkuat keilmuan di bidang ketatanegaraan dan ketatanegaraan Islam secara teoritis. Mata kuliah ini akan banyak membahas bagaimana hubungan timbal balik yang dinamis antara islam dan demokrasi. Perkuliahan ini dimulai dengan menyampaikan materi-materi perkuliahan dan menjelaskan tujuan mata kuliah ini dalam membentuk sarjana yang sesuai dengan komptensi lulusan. Matakuliah ini membahas diantaranya landasan konstitusiional penyelenggaraan otonomi Daerah, Produk Hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
Dosen pengampu					

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Materi/ Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai (%)	Referensi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Memahami Latar Belakang dan Kontrak Belajar	Kontrak Belajar dan pengenalan materi ilmu pengujian Peraturan Perundang-undangan, dan penjelasan Silabus	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa mampu memahami dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas, membuat matriks referensi yang menjadi bahan ajar	Mahasiswa memiliki adab dan tatakrama yang baik selama kegiatan belajar mengajar	5	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung, 2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin, <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia, Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
2	Mampu menjelaskan dan memahami Konsep Pemerintahan Daerah	Bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan Sistem Pemerintahan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa mendiskusikan Konsep pemerintahan dan Pemerintah Daerah	Mengkaji Konsep Pemerintahan Daerah	5	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung, 2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin, <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia, Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>

3	Mampu memahami dan menjelaskan latar Belakang Pelaksanaan otonomi Daerah	Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mahasiswa Dapat menganalisis sejarah Latar belakang Otonomi Daerah di Indonesia	5	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
4	Mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asas Pemerintahan Daerah di NKRI	Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mahasiswa dapat menyimpulkan dan menjelaskan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	5	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>

5	Mampu memahami dan menjelaskan Bentuk Susunan Pemerintah Daerah	Bentuk dan susunan Pemerintah daerah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mahasiswa dapat menyimpulkan Konsep Pemerintah Daerah	5	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
6	Mampu memahami dan menjelaskan tentang Produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Jenis-jenis Produk Hukum Daerah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mengetahui jenis-jenis Produk hukum Daerah, Proses Pembentukan Peraturan Daerah	10	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>

7	Mampu memahami dan menjelaskan tentang hubungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah	Hubungan dalam bidang kewenangan, bentuk pembinaan dan pengawasan, hubungan dalam Bidang Keuangan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mahasiswa mengetahui Hubungan pemerintah daerah dalam bidang kewenangan, pembinaan dan pengawasan dan dalam bidang keuangan	10	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
8	Ujian Tengah Semester							
9	Mampu memahami dan menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam penyelenggaraan otonomi Daerah	Mempelajari Hubungan Prinsip <i>Good Governance</i> dengan Otonomi Daerah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mengetahui prinsip <i>Good Governance</i> dalam penyelenggaraan otonomi Daerah	10	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>

10	Mampu memahami manajemen keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pendapatan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mengetahui proses penyusunan APBD, dana Perimbangan	10	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
11	Mampu memahami dan menjelaskan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekosentrasi dan tugas pembantuan	Mempelajari tujuan penyajian laporan keuangan daerah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mengetahui Pengelolaan Pengelolaan dan Pertanggungja waban keuangan dalam pelaksanaa dekosentrasi dan tugas pembantuan	10	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 ● Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. ● Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. ● Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 ● UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
12	Mampu memahami dan menjelaskan kebijakan Pemerintah dalam	Mempelajari prinsip-prinsip pokok dalam	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif	Mengetahui Ppenganggaran dan manajemen	10	● Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi

	peningkatan Perekonomian daerah dan Pendapatan Pajak Daerah	Penganggaran dan Manajemen Keuangan Daerah			dan diskusi kelompok	Keuangan Daerah, Manajemen Pendapatan Asli Daerah		Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 • Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. • Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. • Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 • UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
13	Mampu memahami dan menjelaskan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah	Mempelajari prinsip dan kriteria perpajakan Daerah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Mengetahui prinsip dan kriteria perpajakan Daerah, Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam mendukung pembiayaan daerah	5	• Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002 • Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung,2005. • Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. • Utang Rosidin , <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia,Bandung, 2019 • UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
14	Mampu memahami dan menjelaskan Pengawasan Produk Hukum daerah oleh Pemerintah	Mempelajari macam-macam pengawasan Pemerintah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Melakukan analisis dalam macam-macam	5	• Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ,2002

						Pengawasan Pemerintah		• Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung, 2005. • Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. • Utang Rosidin, <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia, Bandung, 2019 • UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
15	Mampu memahami dan menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah	Mempelajari dinamika berbagai permasalahan dalam Otonomi Daerah	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100 Menit	Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dan diskusi kelompok	Melakukan analisis persoalan-persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berubah-ubah	5	• Bagir Manan, <i>Menyongsong Fajar Otonomi Daerah</i>, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002 • Ni'matul Huda, R. Nazriyah, <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Nusa Media, Bandung, 2005. • Syamsuddin Haris, <i>Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>, Lipi Press. Jakarta, 2007. • Utang Rosidin, <i>Otonomi Daerah Dan Desentralisasi</i>, Pusaka Setia, Bandung, 2019 • UU No. 12 Tahun 2011 <i>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>
16	Ujian Akhir Semester							

Diverifikasi
Koord Prodi Hukum Tata Negara



Muhammad Idzhar, Lc., M.H.



Divalidasi
Ketua UPM Fakultas Syariah



Nur Syamsi, M.Pd